

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2024



**BAPPEDA Kabupaten Lampung Tengah
2024**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka membangun kehidupan bernegara dengan tingkat keragaman masyarakat dan karakteristik geografis yang unik, pemerintah telah menyusun Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang bersifat terpadu, menyeluruh, sistematis yang responsif terhadap perkembangan zaman sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan kewenangan pemerintahan daerah dalam hal Pengelolaan Keuangan Daerah seperti yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada Pasal 1 (satu), dinyatakan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Sesuai dengan amanat undang-undang nomor 25 tahun 2004 tersebut, Pemerintah Daerah wajib membuat dokumen RPJPD, RPJMD dan dokumen perencanaan tahunan daerah (RKPD). Selanjutnya untuk masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) harus membuat RPJM satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disebut Rencana Strategis (Renstra) SKPD yaitu dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun dan rencana kerja (Renja) SKPD yaitu dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun.

Oleh karena itu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai salah satu perangkat daerah Kabupaten Lampung Tengah berkewajiban untuk menyusun Renja Bappeda yang memuat program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagaimana tertuang dalam peraturan daerah nomor 09 tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun 2024 merupakan Dokumen Perencanaan untuk kegiatan Bappeda Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2024. Dokumen tersebut memuat Perencanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Bappeda yang berdasarkan pada Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 - 2026

Penyusunan Renja Bappeda harus terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya sebagai dasar penyelenggaraan pembangunan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Tengah 2021 – 2026 dan Renstra Bappeda Kabupaten Lampung Tengah 2021 - 2026.

Seiring dengan adanya perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka terjadi pula perubahan Rencana Kerja (Renja), sehingga diperlukan penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan).

Berikut ini kaitan Renstra Bappeda dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya seperti terlihat pada Bagan 1.

1.2 Landasan Hukum

Sebagai landasan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Lampung Tengah adalah:

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124;
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2019-2024;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2006 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah ;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Janka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Perangkat Daerah ;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 17 tahun 2018 Tentang Pengarusutamaan Gender
- Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (KLA)
- Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 – 2026 ;
- Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 09 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Lampung Tengah;
- Peraturan Bupati Lampung Tengah nomor 29 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pemberdayaaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten lampung tengah
- Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 ;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Bappeda Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 ini adalah tersedianya dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang selanjutnya dijadikan pedoman atau acuan dalam menetapkan arah kebijakan

program SKPD. Demikian juga penyusunan Renja Perubahan memiliki maksud dan tujuan yang sama.

Sedangkan penyusunan Renja Bappeda, bertujuan :

- Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pada tahun anggaran yang akan datang.
- Menyediakan pedoman atau acuan dalam merumuskan kebijakan, prioritas program, dan kegiatan tahunan secara terpadu, terarah, dan terukur yang akan dibiayai oleh APBD Kabupaten Lampung Tengah dan sumber pembiayaan yang berasal dari Pemerintah Propinsi dan Pusat.
- Memberikan arah pembangunan dalam jangka 1 (satu) tahun ke depan.
- Memberikan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bappeda secara sinergis, koordinatif, dan terpadu serta berkelanjutan.
- Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.
- Memberikan tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja selama satu tahunan untuk satuan kerja perangkat daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun Sistematika Penyusunan Renja Perubahan Bappeda Kabupaten Lampung Tengah tahun 2024 masih sama dengan renja 2024 yaitu sebagai berikut:

I. Pendahuluan

Bab ini memuat tentang latar belakang penyusunan Renja Bappeda Lampung Tengah, Landasan Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan Penyusunan, serta Sistematika Penulisan.

II. Evaluasi pelaksanaan Renja BAPPEDA tahun lalu

Bab ini menyajikan informasi yang mencakup tentang (1) Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun lalu dan Capaian Renstra Bappeda, (2) Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda, (3) Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda, (4) Review terhadap Rancangan Awal RKPD, dan (5) Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

III. Tujuan Dan Sasaran

Bab ini berisikan tentang (1) Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, (2) Tujuan dan sasaran Renja Bappeda

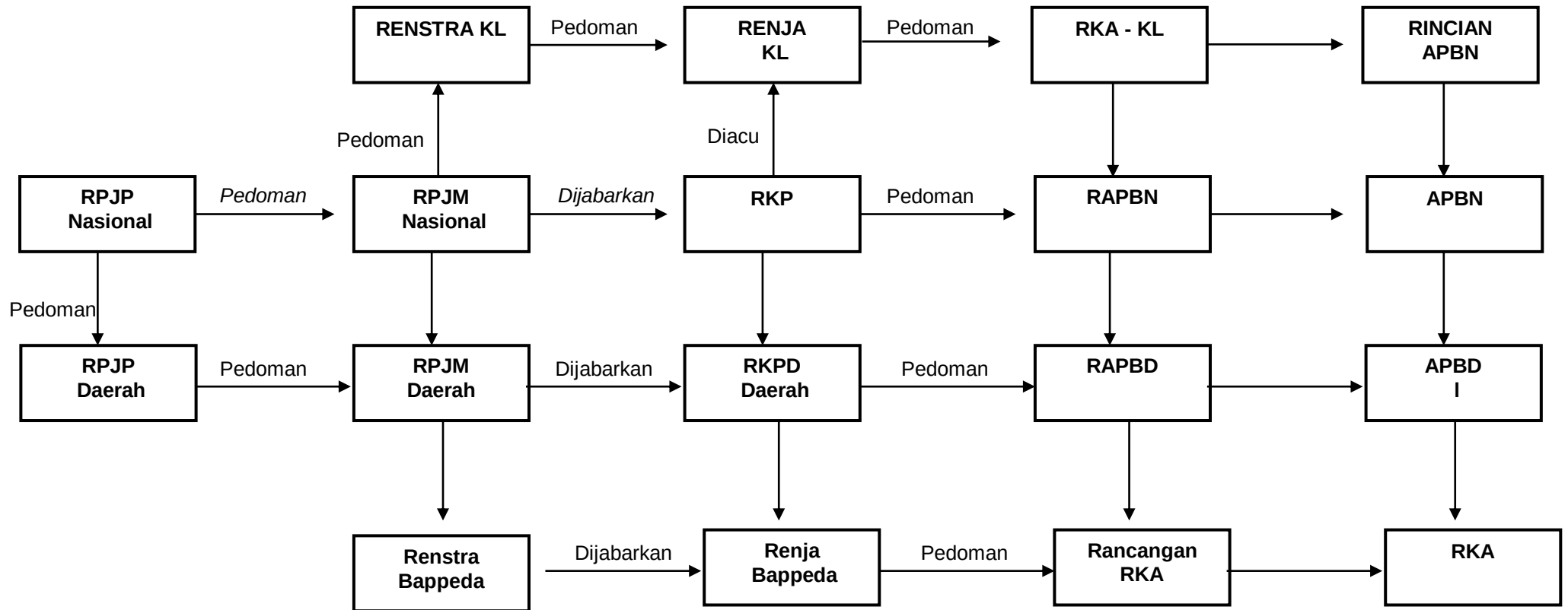
IV. Program dan Kegiatan

Bab ini berisikan tentang Program dan Kegiatan Bappeda Kabupaten Lampung Tengah.

V. Penutup

Bab ini memuat penjelasan tentang kaidah pelaksanaan renja perubahan Bappeda, penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan Renja perubahan, dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan, serta catatan dan harapan OPD.

Bagan 1
Hubungan Renstra Bappeda Lampung Tengah
Dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun Lalu dan Capaian Renstra Bappeda

Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 di peroleh dari realisasi APBD dan hasil kinerja tahunan Bappeda Kabupaten Lampung Tengah. Pada Tahun 2023 Pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Lampung Tengah dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana aksi Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang berkualitas yang bertujuan :

- 1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah**
- 2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja badan perencanaan pembangunan daerah**

Dan Indikator Kinerja Utama dari tujuan dan sasaran Bappeda Kabupaten Lampung Tengah adalah :

- 1. Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah komponen perencanaan kinerja
- 2. Persentase Indikator Sasaran RPJMD tercapai atau melebihi target tahunan
- 3. Nilai AKIP Bappeda.

Target dan realisasi dari IKU Bappeda Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022 Mencapai target hasil tersebut dapat dilihat pada table 2.1.

TABEL 2.1
Target Kinerja Bappeda Tahun 2020-2026
berdasarkan Sasaran Strategi dan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tujuan : Terwujudnya Perencanaan dan Pengendalian pembangunan daerah yang berkualitas								
No	Indikator Kinerja	satuan	Baseline 2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah komponen perencanaan kinerja	Poin	22.05	22.06	22.07	22.08	22.09	22.10
2	Persentase Indikator Sasaran RPJMD tercapai atau melebihi target tahunan	%	76.7	77	77.3	77.6	77.9	78.2
3	Nilai AKIP Bappeda	Poin	75	75.3	75.6	75.9	76.2	76.5

Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bappeda kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- 1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- 2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Hasil Review target dan realisasi kinerja program dan kegiatan Bappeda Kabupaten Lampung Tengah tersebut tercantum pada table 2.2 (Tabel TC.29) berikut

TABEL 2.2 (Tabel TC.29)
REKAPITULASI EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA LAMPUNG TENGAH
DAN PENCAPAIAN RENSTRA BAPPEDA LAMPUNG TENGAH S/D TAHUN 2023
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra BAPPEDA LT) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja BAPPEDA LT tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja BAPPEDA LT tahun (2023)	Realisasi Renja BAPPEDA LT tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realiasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2024
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
							K	K	K	K	%	K	K	%
5					Unsur Penunjang Urausan Pemerintahan									
5	01				Perencanaan									
5	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang	90		95	95	100%	95	95	106%

						disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku								
						Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100		100	100	100%	100	100	100%
						Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin	100		100	100	100%	100	100	100%
						Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	85		90	90	100%	90	90	106%
5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan	8		14	14	100%	14	14	175%

						Perundang-Undangan yang berlaku									
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	3		3	3	100%	3	3	100%	
5	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	4		4	4	100%	4	4	100%	
5	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	2		2	2	100%	2	2	100%	
5	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Hasil Renja Perangkat daerah yang disusun	5		5	5	100%	5	5	100%	
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen keuangan perangkat daerah yang disusun	18		42	42	100%	42	42	233%	

5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah fasilitas pengajuan Gaji dan Tunjangan ASN Perangkat Daerah	12		12	12	100%	12	12	100%
5	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah penyediaan honorarium administrasi pelaksanaan tugas ASN	12		12	12	100%	12	12	100%
5	01	01	2.02	03	Pelaksanaan penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12		12	12	100%	12	12	100%
5	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun Perangkat Daerah yang disusun	18		18	18	100%	18	18	100%
5	01	01	2.02	06	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah bahan tanggapan pemeriksaann Perangkat Daerah yang disusun	12		12	12	100%	12	12	100%

5	01	01	2.02	07	Koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran Perangkat Daerah yang disusun	12		12	12	100%	12	12	100%
5	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disusun	12		12	12	100%	12	12	100%
5	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disusun	12		12	12	100%	12	12	100%
5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang telah melengkapi berkas kepegawaianya	60		63	63	100%	63	63	105%
						Jumlah pegawai yang tidak pernah	60		63	63	100%	63	63	105%

						mendapat hukuman disiplin								
						Jumlah pegawai yang telah memenuhi standar kompetensi teknis sesuai dengan bidang tugasnya	5		6	6	100%	6	6	120%
5	01	01	2.05	01	peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	10		10	10	100%	10	10	100%
5	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan pendataan pegawai yang disusun	12		12	12	100%	12	12	100%
5	01	01	2.05	04	Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	Jumlah laporan informasi pegawai yang disusun	10		10	10	100%	10	10	100%
5	01	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan	Jumlah Monitoring,	11		11	11	100%	11	11	100%

					Penilaian kinerja pegawai	Evaluasi, dan Penilaian kinerja pegawai yang disusun								
5	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan tugas dan fungsi	10		10	10	100%	10	10	100%
5	01	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	63		63	63	100%	63	63	100%
5	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-	63		63	63	100%	63	63	100%

						undangan									
5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah	102		72	72	100%	72	72	71%	
5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12		12	12	100%	12	12	100%	
5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1		1	1	100%	1	1	100%	
5	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah kebutuhan peralatan Rumah Tangga yang disediakan	30		30	30	100%	30	30	100%	
5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	30		30	30	100%	30	30	100%	

						Jumlah penggandaan kebutuhan kantor	30		30	30	100%	30	30	100%
5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi PD	24		24	24	100%	24	24	100%
5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan	34		34	34	100%	34	34	100%
5	01	01	2.07	06	Pengadaan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan pada Perangkat Daerah yang disediakan	2		2	2	100%	2	2	100%
5	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya pada Perangkat Daerah yang disediakan	32		32	32	100%	32	32	100%

5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan	3		3	3	100%	3	3	100%
5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah pelayanan jasa kantor	3		3	3	100%	3	3	100%
5	01	01	2.06		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan	21		23	23	100%	23	23	110%
5	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas perorangan/jabatan yang mendapat pemeliharaan	1		1	1	100%	1	1	100%

5	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang mendapat pemeliharaan	12		12	12	100%	12	12	100%
5	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang mendapat pemeliharaan	7		9	9	100%	9	9	129%
5	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang mendapat pemeliharaan/rehabilitasi	1		1	1	100%	1	1	100%
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Ketersediaan Data Dan Informasi Perencanaan	75		90	90	100%	90	90	120%

5	01	02	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah pelaksanaan forum PD/Lintas Perangkat daerah yang dilaksanakan	1		1	1	100%	1	1	100%
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten yang dilaksanakan	1		1	1	100%	1	1	100%
5	01	02	2.01	06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah dokumen kooridnasi Musrenbang RKPD di Kecamatan yang disusun	1		1	1	100%	1	1	100%
5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan Perkada	3		3	3	100%	3	3	100%
5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi	Jumlah ketersediaan	2		2	2	100%	2	2	100%

					Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	data dan informasi perencanaan pembangunan daerah									
5	01	02	2.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	1		1	1	100%	1	1	100%	
5	01	02	2.02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah PD yang mendapat pembinaan	46		46	46	100%	46	46	100%	
5	01	02	2.02	03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen profil pembangunan daerah Kabupaten Lampung Tengah yang disusun	1		1	1	100%	1	1	100%	
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi dokumen	12		12	12	100%	12	12	100%	

					Daerah	perencanaan pembangunan daerah yang disusun								
5	01	02	2.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi kebijakan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang disusun	5		4	4	100%	4	4	80%
5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen evaluasi terhadap hasil RKPD yang disusun (triwulanan)	8		8	8	100%	8	8	100%
5	01	03			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase PD dengan rata-rata capaian kinerja di atas 76%	90		98	98	100%	98	98	109%
						Persentase Dokumen Renstra Kualitas Baik	100		100	100	100%	100	100	100%
						Persentase Dokumen Renja Kualitas Baik	100		100	100	100%	100	100	100%

5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen Renstra dan Renja PD lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia kualitas baik	17		20	20	100%	20	20	118%
5	01	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang Pemerintahan yang disusun tepat waktu	1		1	1	100%	1	1	100%
5	01	03	2.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah PD yang dilakukan asistensi dokumen perencanaan	4		4	4	100%	4	4	100%
5	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Rekomendasi Lingkup Bidang Pemerintahan yang ditindaklanjuti	4		4	4	100%	4	4	100%

					Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan									
5	01	03	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang disusun	1		1	1	100%	1	1	100%
5	01	03	2.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang Pembangunan Manusia yang disusun tepat waktu	1		1	1	100%	1	1	100%
5	01	03	2.01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah PD yang dilakukan asistensi dokumen perencanaan	16		16	16	100%	16	16	100%

5	01	03	2.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Rekomendasi Lingkup Bidang Pembangunan Manusia yang ditindaklanjuti	16		16	16	100%	16	16	100%
5	01	03	2.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang disusun	6		6	6	100%	6	6	100%
5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen Renstra dan Renja PD lingkup bidang Perekonomian dan Sumber	11		11	11	100%	11	11	100%

						Daya Alam (SDA) kualitas baik								
5	01	03	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang Perekonomian yang disusun tepat waktu	1		1	1	100%	1	1	100%
5	01	03	2.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah PD yang dilakukan asistensi dokumen perencanaan	11		11	11	100%	11	11	100%
5	01	03	2.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Rekomendasi Lingkup Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti	11		11	11	100%	11	11	100%

5	01	03	2.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang disusun	1		1	1	100%	1	1	100%
5	01	03	2.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam (SDA) (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang Sumber Daya Alam (SDA) yang disusun tepat waktu	1		1	1	100%	1	1	100%
5	01	03	2.02	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam (SDA)	Jumlah PD yang dilakukan asistensi dokumen perencanaan	11		11	11	100%	11	11	100%
5	01	03	2.02	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Rekomendasi Lingkup Bidang Sumber Daya Alam (SDA) yang	11		11	11	100%	11	11	100%

					Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam (SDA)	ditindaklanjuti									
5	01	03	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam (SDA)	Jumlah dokumen Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam (SDA) yang disusun	1		1	1	100%	1	1	100%	
5	01	03	3.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen Renstra dan Renja PD lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan kualitas baik	6		6	6	100%	6	6	100%	
5	01	03	3.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang Infrastruktur yang disusun tepat waktu	1		1	1	100%	1	1	100%	

5	01	03	3.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah PD yang dilakukan asistensi dokumen perencanaan	11		11	11	100%	11	11	100%
5	01	03	3.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Rekomendasi Lingkup Bidang Infrastruktur yang ditindaklanjuti	3		3	3	100%	3	3	100%
5	01	03	3.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang disusun	1		1	1	100%	1	1	100%
5	01	03	3.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang kewilayahan	1		1	1	100%	1	1	100%

					(RPJPD, RPJMD dan RKPD)	yang disusun tepat waktu								
5	01	03	3.03	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah PD yang dilakukan asistensi dokumen perencanaan	12		12	12	100%	12	12	100%
5	01	03	3.03	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Rekomendasi Lingkup Bidang Kewilayahan yang ditindaklanjuti	5		5	5	100%	5	5	100%
5	01	03	3.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang disusun	1		1	1	100%	1	1	100%

Dari tabel tersebut dapat dijabarkan realisasi sub kegiatan telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan berupa :

1) Realisasi Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan.

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun
- Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD
- Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD
- Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai
- Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian
- Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian
- Monitoring Evaluasi dan penilaian kinerja pegawai
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi
- Sosialisasi peraturan perundang-undangan
- Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak , dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
- Pelaksanaan konsultasi publik
- Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD / Lintas SKPD
- Pelaksanaan Musrebang Kabupaten / Kota
- Penyiapan Bahan Koordinasi Musrebang Kecamatan
- Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota
- Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD
- Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota

- Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten / Kota
- Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Pembangunan Manusia
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam
- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan

- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN BAPPEDA LAMPUNG TENGAH

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Bappeda Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan indikator kinerja telah sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda serta ketentuan peraturan perundang – undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Indikator Kinerja Utama pada Bappeda Kabupaten Lampung Tengah adalah Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan Meningkatnya akuntabilitas kinerja badan perencanaan pembangunan daerah. Indikator Kinerja Bappeda sendiri yang terdiri dari

- Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah komponen perencanaan kinerja
- Persentase Indikator Sasaran RPJMD tercapai atau melebihi target tahunan
- Nilai Akip Bappeda Kabupten Lampung Tengah.

Sesuai dengan Renstra Bappeda Kabupten Lampung Tengah 2021 – 2026 target indikator kinerja dan realisasi dari tujuan dan sasaran strategis Bappeda Lampung Tengah Tahun 2021 adalah :

- Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda
- Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang ditetapkan oleh Perkada/ Perda
- Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang ditetapkan oleh Perkada
- Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke Dalam RKPD
- Penjabaran konsistensi program RKPD ke Dalam APBD

Hasil Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Lampung Tengah tercantum pada table 2.3 (Tabel Tc.30) sebagai berikut :

TABEL 2.3												
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH												
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH												
NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang ditetapkan oleh Perkada/ Perda		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang ditetapkan oleh Perkada		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
4	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke Dalam RKPD		80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	
5	Penjabaran konsistensi program RKPD ke Dalam APBD		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bappeda Kabupaten Lampung Tengah tidak terlepas dari lingkungan eksternal yang sangat berpengaruh serta dapat mendukung terhadap pelaksanaan tugas. Hal ini mengingatkan bahwa setiap aspek kegiatan yang dilakukan oleh Bappeda diperlukan partisipasi aktif dari pihak-pihak lain sehingga koordinasi dan kerjasama yang baik dari pihak-pihak terkait diharapkan dapat mendorong keberhasilan pelaksanaan tugas Bappeda.

A. TANTANGAN

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam bidang Perencanaan Pembangunan Daerah diantaranya :

1. Kualitas dokumen perencanaan masih perlu ditingkatkan
2. Belum optimalnya kesadaran organisasi perangkat daerah dalam menyampaikan informasi dan data yang lengkap dan akurat serta tepat waktu mengakibatkan perencanaan yang disusun kurang optimal.
3. Dokumen perencanaan yang telah disusun belum digunakan sebagai acuan secara optimal.
4. Belum optimalnya pengelolaan website sebagai media untuk menyebarluaskan informasi hasil-hasil pembangunan, karena terbatasnya sumber informasi serta keterbatasan SDM yang mampu mengelola website secara profesional.
5. Intervensi pihak-pihak tertentu dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

6. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan daerah
7. Belum selarasnya perencanaan antar sector, antar bidang dan antar wilayah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
8. Ketergantungan pendanaan pembangunan daerah pada pemerintah pusat
9. Ketidakstabilan perekonomian nasional.
10. Belum optimalnya pelaksanaan pengendalian pembangunan daerah

B. PELUANG

Faktor-faktor eksternal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda, antara lain:

1. Adanya kewenangan yang jelas sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku
2. Dukungan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah sebagai pemegang kebijakan pembangunan di daerah.
3. Dukungan Dinas/ Instansi baik vertikal maupun horizontal.
4. Dukungan perguruan tinggi, LSM ataupun lembaga lain yang berkompeten.
5. Dukungan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan daerah
6. Meningkatnya akses data dan informasi melalui pemanfaatan teknologi informasi

Faktor-faktor diatas merupakan peluang yang mendukung pengembangan pelayanan Bappeda Kabupaten Lampung Tengah, diharapkan dengan adanya peluang-peluang tersebut Bappeda dapat meningkatkan pelayanan sesuai tugas dan fungsi pelayanannya.

C. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda

Dalam melaksanakan tugasnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menghadapi berbagai permasalahan yang dapat menghambat pencapaian kinerjanya. Permasalahan-permasalahan tersebut dikelompokkan berdasarkan fungsi pelayanan Bappeda sebagai berikut:

1. Dalam perumusan kebijakan teknis perencanaan, permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:
 - kapasitas sumber daya aparatur yang kurang memadai dalam teknis penyusunan rencana pembangunan daerah
 - adanya keterbatasan data dan informasi perencanaan daerah

- belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian/ pengkajian potensi daerah.
 - belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi pembangunan daerah.
2. Dalam pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan, permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:
- Belum optimalnya satuan kerja perangkat daerah dalam menyampaikan informasi dan data yang akurat dan tepat waktu.
 - Dokumen perencanaan yang telah disusun belum optimal digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan lanjutan.
 - Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah belum dapat dilakukan secara optimal.
 - Belum selarasnya perencanaan antar sektor, antar bidang dan antar wilayah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
 - Intervensi pihak-pihak tertentu dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
 - Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
3. Dalam pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah, permasalahan yang dihadapi adalah:
- Kurangnya pelaksanaan program peningkatan kapasitas SDM.
 - Kurangnya pemahaman SDM tentang peraturan perundangan.
 - Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan daerah.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya, permasalahan yang dihadapi adalah Adanya beban tugas yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi pelayanan Bappeda.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 sebagian besar telah sesuai dengan hasil analisis kebutuhan perencanaan pembangunan Daerah dengan mengikuti mekanisme partisipatif dimana Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Tengah menjadi salah satu instrumen untuk menyusun Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD) kabupaten Lampung Tengah. Rencana Kerja (Renja) berfungsi

juga sebagai sarana peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah dan sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024, sedangkan RKPD digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah. RKPD juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh Pemangku Kepentingan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Hasil analisis kebutuhan Tahun 2022 adalah :

1. Jumlah program/ kegiatan/sub kegiatan yang ada RKPD Tahun 2022 sama dengan Renja Tahun 2022.
2. Seluruh program/ kegiatan/sub kegiatan yang ada dalam Renja Tahun 20221 sesuai dengan program yang ada dalam Renstra Bappeda Kabupaten Lampung Tengah 2021 – 2026.
3. Ada beberpa program/ kegiatan/sub kegiatan pada TA 2022 yang mendapat penambahan/pengurangan anggaran pada APBD TA 2022.

Review terhadap rancangan RKPD selengkapnya dapat dilihat pada table 2.3.

TABEL 2.3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN BAPPEDA TAHUN 2024
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Lampung Tengah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	3	43,735,230	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Lampung Tengah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	3	45,921,992	
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Lampung Tengah	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	4	8,967,210	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Lampung Tengah	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	4	9,415,571	
5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Lampung Tengah	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	2	6,836,130	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Lampung Tengah	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	2	7,177,937	

6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lampung Tengah	Jumlah Laporan Evaluasi Hasil Renja Perangkat daerah yang disusun	5	14,739,060	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lampung Tengah	Jumlah Laporan Evaluasi Hasil Renja Perangkat daerah yang disusun	5	15,476,013	
7	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				-	
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Lampung Tengah	Jumlah fasilitasi pengajuan Gaji dan Tunjangan ASN Perangkat Daerah	12	5,845,824,082	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Lampung Tengah	Jumlah fasilitasi pengajuan Gaji dan Tunjangan ASN Perangkat Daerah	12	6,138,115,286	
9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Lampung Tengah	Jumlah penyediaan honorarium administrasi pelaksanaan tugas ASN	12	675,147,375	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Lampung Tengah	Jumlah penyediaan honorarium administrasi pelaksanaan tugas ASN	12	708,904,744	
10	Pelaksanaan penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Lampung Tengah	Jumlah pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12	6,152,160	Pelaksanaan penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Lampung Tengah	Jumlah pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12	6,459,768	
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Lampung Tengah	Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun Perangkat Daerah yang disusun	18	5,959,905	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Lampung Tengah	Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun Perangkat Daerah yang disusun	18	6,257,900	
12	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Lampung Tengah	Jumlah bahan tanggapan pemeriksaann Perangkat Daerah yang disusun	12	6,958,875	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Lampung Tengah	Jumlah bahan tanggapan pemeriksaann Perangkat Daerah yang disusun	12	7,306,819	

13	Koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran	Lampung Tengah	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran Perangkat Daerah yang disusun	12	36,253,560	Koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran	Lampung Tengah	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran Perangkat Daerah yang disusun	12	38,066,238	
14	Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah					Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah				-	
15	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Lampung Tengah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disusun	12	9,294,075	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Lampung Tengah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disusun	12	9,758,779	
16	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				-	
17	peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Lampung Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	10	6,489,105	peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Lampung Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	10	6,813,560	
18	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Lampung Tengah	Jumlah laporan pendataan pegawai yang disusun	12	9,194,850	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Lampung Tengah	Jumlah laporan pendataan pegawai yang disusun	12	9,654,593	
19	Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	Lampung Tengah	Jumlah laporan informasi pegawai yang disusun	10	6,201,510	Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	Lampung Tengah	Jumlah laporan informasi pegawai yang disusun	10	6,511,586	
20	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian kinerja pegawai	Lampung Tengah	Jumlah Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian kinerja pegawai yang disusun	11	6,828,675	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian kinerja pegawai	Lampung Tengah	Jumlah Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian kinerja pegawai yang disusun	11	7,170,109	

21	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Lampung Tengah	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan tugas dan fungsi	10	52,500,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Lampung Tengah	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan tugas dan fungsi	10	55,125,000	
22	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Lampung Tengah	Jumlah pegawai yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	63	8,832,075	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Lampung Tengah	Jumlah pegawai yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	63	9,273,679	
23	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan	Lampung Tengah	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan	63	80,266,305	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan	Lampung Tengah	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan	63	84,279,620	
24	Administrasi Umum Perangkat Daerah					Administrasi Umum Perangkat Daerah				-	
25	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Lampung Tengah	Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12	50,808,765	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Lampung Tengah	Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12	53,349,203	
26	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Lampung Tengah	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1	210,000,000	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Lampung Tengah	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1	220,500,000	

27	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Lampung Tengah	Jumlah kebutuhan peralatan Rumah Tangga yang disediakan	30	29,763,930	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Lampung Tengah	Jumlah kebutuhan peralatan Rumah Tangga yang disediakan	30	31,252,127	
28	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Lampung Tengah	Jumlah barang cetakan yang disediakan	30	80,767,575	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Lampung Tengah	Jumlah barang cetakan yang disediakan	30	84,805,954	
29	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lampung Tengah	Jumlah penggandaan kebutuhan kantor	30		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lampung Tengah	Jumlah penggandaan kebutuhan kantor	30	-	
30		Lampung Tengah	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi PD	24	189,221,550		Lampung Tengah	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi PD	24	198,682,628	
31	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	
32	Pengadaan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Lampung Tengah	Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan pada Perangkat Daerah yang disediakan	2	66,544,800	Pengadaan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Lampung Tengah	Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan pada Perangkat Daerah yang disediakan	2	69,872,040	
33	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Lampung Tengah	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya pada Perangkat Daerah yang disediakan	32	178,788,750	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Lampung Tengah	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya pada Perangkat Daerah yang disediakan	32	187,728,188	
34	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	
35	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Lampung Tengah	Jumlah pelayanan jasa kantor	3	480,942,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Lampung Tengah	Jumlah pelayanan jasa kantor	3	504,989,100	

36	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	
37	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Lampung Tengah	Jumlah kendaraan dinas perorangan/jabatan yang mendapat pemeliharaan	1	43,753,500	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Lampung Tengah	Jumlah kendaraan dinas perorangan/jabatan yang mendapat pemeliharaan	1	45,941,175	
38	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Lampung Tengah	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang mendapat pemeliharaan	12	208,960,500	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Lampung Tengah	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang mendapat pemeliharaan	12	219,408,525	
39	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Lampung Tengah	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang mendapat pemeliharaan	9	121,936,500	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Lampung Tengah	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang mendapat pemeliharaan	9	128,033,325	
40	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Lampung Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang mendapat pemeliharaan/rehabilitasi	1	57,921,675	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Lampung Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang mendapat pemeliharaan/rehabilitasi	1	60,817,759	
41	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah					Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah				-	
42	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan					Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan				-	

43	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Lampung Tengah	Jumlah dokumen penelaahan rencana pembangunan daerah dengan dokumen kebijakan lainnya	3	71,928,255	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Lampung Tengah	Jumlah dokumen penelaahan rencana pembangunan daerah dengan dokumen kebijakan lainnya	3	75,524,668	
44	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Lampung Tengah	Jumlah Pelaksanaan Konsultasi Publik			Pelaksanaan Konsultasi Publik	Lampung Tengah	Jumlah Pelaksanaan Konsultasi Publik		-	
45	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Lampung Tengah	Jumlah pelaksanaan forum PD/Lintas Perangkat daerah yang dilaksanakan	1	45,764,250	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Lampung Tengah	Jumlah pelaksanaan forum PD/Lintas Perangkat daerah yang dilaksanakan	1	48,052,463	
46	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Lampung Tengah	Jumlah pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten yang dilaksanakan	1	292,561,290	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Lampung Tengah	Jumlah pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten yang dilaksanakan	1	307,189,355	
47	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Lampung Tengah	Jumlah dokumen kooridnasi Musrenbang RKPD di Kecamatan yang disusun	1	72,383,745	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Lampung Tengah	Jumlah dokumen kooridnasi Musrenbang RKPD di Kecamatan yang disusun	1	76,002,932	
48	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Lampung Tengah	Jumlah dokumen Rencana Pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan Perkada	3	524,398,770	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Lampung Tengah	Jumlah dokumen Rencana Pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan Perkada	3	550,618,709	
49	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah					Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				-	

50	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Lampung Tengah	Jumlah dokumen analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	1	241,217,235	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Lampung Tengah	Jumlah dokumen analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	1	253,278,097	
51	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Lampung Tengah	Jumlah PD yang mendapat pembinaan	46	57,019,200	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Lampung Tengah	Jumlah PD yang mendapat pembinaan	46	59,870,160	
52	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Lampung Tengah	Jumlah dokumen profil pembangunan daerah Kabupaten Lampung Tengah yang disusun	1	121,938,705	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Lampung Tengah	Jumlah dokumen profil pembangunan daerah Kabupaten Lampung Tengah yang disusun	1	128,035,640	
53	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah					Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				-	
54	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Lampung Tengah	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi kebijakan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang disusun	4	57,021,615	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Lampung Tengah	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi kebijakan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang disusun	4	59,872,696	
55	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Lampung Tengah	Jumlah dokumen evaluasi terhadap hasil RKPD yang disusun (triwulanan)	8	170,131,920	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Lampung Tengah	Jumlah dokumen evaluasi terhadap hasil RKPD yang disusun (triwulanan)	8	178,638,516	

56	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah					Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah				-	
57	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia					Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				-	
58	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Lampung Tengah	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang Pemerintahan yang disusun tepat waktu	1	88,749,360	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Lampung Tengah	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang Pemerintahan yang disusun tepat waktu	1	93,186,828	
59	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Lampung Tengah	Jumlah PD yang dilakukan asistensi dokumen perencanaan	4	24,111,150	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Lampung Tengah	Jumlah PD yang dilakukan asistensi dokumen perencanaan	4	25,316,708	
60	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Lampung Tengah	Jumlah Rekomendasi Lingkup Bidang Pemerintahan yang ditindaklanjuti	4	97,882,050	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Lampung Tengah	Jumlah Rekomendasi Lingkup Bidang Pemerintahan yang ditindaklanjuti	4	102,776,153	

61	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Lampung Tengah	Jumlah dokumen Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang disusun	1	84,989,835	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Lampung Tengah	Jumlah dokumen Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang disusun	1	89,239,327	
62	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Lampung Tengah	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang Pembangunan Manusia yang disusun tepat waktu	1	119,612,325	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Lampung Tengah	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang Pembangunan Manusia yang disusun tepat waktu	1	125,592,941	
63	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Lampung Tengah	Jumlah PD yang dilakukan asistensi dokumen perencanaan	16	40,107,900	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Lampung Tengah	Jumlah PD yang dilakukan asistensi dokumen perencanaan	16	42,113,295	
64	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Lampung Tengah	Jumlah Rekomendasi Lingkup Bidang Pembangunan Manusia yang ditindaklanjuti	16	194,612,250	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Lampung Tengah	Jumlah Rekomendasi Lingkup Bidang Pembangunan Manusia yang ditindaklanjuti	16	204,342,863	
65	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Lampung Tengah	Jumlah dokumen Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	6	234,978,450	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan	Lampung Tengah	Jumlah dokumen Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan	6	246,727,373	

			Bidang Pembangunan Manusia yang disusun			Manusia		Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang disusun			
66	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)					Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				-	
67	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Lampung Tengah	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang Perekonomian yang disusun tepat waktu	1	201,166,035	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Lampung Tengah	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang Perekonomian yang disusun tepat waktu	1	211,224,337	
68	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Lampung Tengah	Jumlah PD yang dilakukan asistensi dokumen perencanaan	11	68,324,025	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Lampung Tengah	Jumlah PD yang dilakukan asistensi dokumen perencanaan	11	71,740,226	
69	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Lampung Tengah	Jumlah Rekomendasi Lingkup Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti	11	51,284,940	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Lampung Tengah	Jumlah Rekomendasi Lingkup Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti	11	53,849,187	

70	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Lampung Tengah	Jumlah dokumen Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang disusun	1	157,500,000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Lampung Tengah	Jumlah dokumen Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang disusun	1	165,375,000	
71	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam (SDA) (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Lampung Tengah	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang Sumber Daya Alam (SDA) yang disusun tepat waktu	1	188,147,400	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam (SDA) (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Lampung Tengah	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang Sumber Daya Alam (SDA) yang disusun tepat waktu	1	197,554,770	
72	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam (SDA)	Lampung Tengah	Jumlah PD yang dilakukan asistensi dokumen perencanaan	11	75,881,400	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam (SDA)	Lampung Tengah	Jumlah PD yang dilakukan asistensi dokumen perencanaan	11	79,675,470	
73	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam (SDA)	Lampung Tengah	Jumlah Rekomendasi Lingkup Bidang Sumber Daya Alam (SDA) yang ditindaklanjuti	11	57,175,650	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam (SDA)	Lampung Tengah	Jumlah Rekomendasi Lingkup Bidang Sumber Daya Alam (SDA) yang ditindaklanjuti	11	60,034,433	

74	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam (SDA)	Lampung Tengah	Jumlah dokumen Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam (SDA) yang disusun	1	157,500,000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam (SDA)	Lampung Tengah	Jumlah dokumen Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam (SDA) yang disusun	1	165,375,000	
75	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Lampung Tengah				Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Lampung Tengah			-	
76	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Lampung Tengah	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang Infrastruktur yang disusun tepat waktu	1	184,516,500	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Lampung Tengah	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang Infrastruktur yang disusun tepat waktu	1	193,742,325	
77	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Lampung Tengah	Jumlah PD yang dilakukan asistensi dokumen perencanaan	11	51,810,544	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Lampung Tengah	Jumlah PD yang dilakukan asistensi dokumen perencanaan	11	54,401,071	
78	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Lampung Tengah	Jumlah Rekomendasi Lingkup Bidang Infrastruktur yang ditindaklanjuti	3	70,497,000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Lampung Tengah	Jumlah Rekomendasi Lingkup Bidang Infrastruktur yang ditindaklanjuti	3	74,021,850	

79	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Lampung Tengah	Jumlah dokumen Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang disusun	1	218,610,000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Lampung Tengah	Jumlah dokumen Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang disusun	1	229,540,500	
80	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Lampung Tengah	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang Kewilayahan yang disusun tepat waktu	1	260,663,550	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Lampung Tengah	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang Kewilayahan yang disusun tepat waktu	1	273,696,728	
81	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Lampung Tengah	Jumlah PD yang dilakukan asistensi dokumen perencanaan	12	67,042,500	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Lampung Tengah	Jumlah PD yang dilakukan asistensi dokumen perencanaan	12	70,394,625	
82	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Lampung Tengah	Jumlah Rekomendasi Lingkup Bidang Kewilayahan yang ditindaklanjuti	5	163,201,920	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Lampung Tengah	Jumlah Rekomendasi Lingkup Bidang Kewilayahan yang ditindaklanjuti	5	171,362,016	
83	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Lampung Tengah	Jumlah dokumen Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang	1	212,677,500	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Lampung Tengah	Jumlah dokumen Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	1	223,311,375	

			disusun					Kewilayahan yang disusun			
--	--	--	---------	--	--	--	--	-----------------------------	--	--	--

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tidak menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) Kecamatan karena Bappeda bukan merupakan perangkat daerah yang memiliki kewenangan untuk mengusulkan Program dan Kegiatan masyarakat.

Adapaun	tabel	tc	2.4
---------	-------	----	-----

Tabel 2.4
SASARAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran (Outcomes)	Formulasi/Penjelasan	Satuan	Target						OPD PENANGGUNG JAWAB
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Terwujudnya Perencanaan dan Pengendalian pembangunan daerah yang berkualitas (indikator Nilai Akip Pemerintah Daerah)	1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	1. Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah komponen perencanaan kinerja		Poin	22.06	22.07	22.08	22.09	22.1	22.2	
		2. Persentase Indikator Sasaran RPJMD tercapai atau melebihi target tahunan		%	77	77.03	77.06	77.09	78.02	78.12	
	2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja badan perencanaan pembangunan daerah	Nilai AKIP Bappeda		Poin	75.03	75.06	75.09	76.03	76.05	76.1	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Visi Pembangunan Nasional yaitu : Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.

Selaras dengan Visi-Misi dari Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Visi dari Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024 adalah :

“Perencanaan Pembangunan Nasional yang berkualitas dan kredibel untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” dalam mendukung Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Sejalan dengan itu, pengertian kata berkualitas dan kredibel terkait dengan pernyataan visi dapat dijelaskan sebagai berikut:

- **Berkualitas :**

1. Perencanaan yang dihasilkan menjadi acuan/pedoman bagi Kementerian/Lembaga/Daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan dan melaksanakan program dan kegiatannya masing-masing;
2. Produk perencanaan dan penganggaran yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara selaras antar sektor, antara pusat dan daerah, dan antardaerah; dan
3. Kelembagaan menerapkan prinsip-prinsip *good and clean governance*.

- **Kredibel :**

1. perencanaan yang berdasarkan pertimbangan atas pengetahuan, informasi, dan data yang terkini (*evidence based*) dengan mekanisme pelaksanaan (*delivery mechanism*) secara partisipatif dan berorientasi ke depan

Misi Kementerian PPN/Bappenas tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Misi-1 : Menyelenggarakan perencanaan yang mampu mengarahkan pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian kemajuan dan kesejahteraan bangsa.

Misi-2 : Memperkuat kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien. Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, Kementerian

PPN/Bappenas menetapkan 3 (tiga) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut:

Misi-1

- **Tujuan-1** : Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia.
- **Tujuan-2** : Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Misi-2

- **Tujuan-3** : Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien.

Sasaran Strategi (SS) yang telah ditetapkan merupakan kondisi yang akan dicapai selama periode lima tahun yang akan datang sebagai akibat yang ditimbulkan oleh adanya hasil/dampak (outcome/impact) dari satu program atau gabungan yang telah dilaksanakan oleh seluruh unit kerja lingkup Bappenas. Indikator Kinerja Utama (IKU) dari masing-masing sasaran strategis Bappenas 2020-2024 disajikan pada table 3.1

Tabel 3.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024Tujuan dan Sasaran

Tujuan bappenas	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan indonesia	1	SS-1: Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional : a. Integrasi Perencanaan Pembangunan Pusat b. Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Pusat c. Sinergi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah	75	80	85	90	95
			Persentase Perencana yang Memenuhi Standar Kompetensi	85%	87,5%	90%	92,5%	95%
	2	SS-2: Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional	Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional a. Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Pusat b. Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah	80-83,9%	84-87,9%	88-91,9%	92-95,9%	96-100%
Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan	3	SS-3: Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner	3.1. Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L	85-87,9%	88-90,9%	91-93,9%	94-96,9%	97-100%
			3.2. Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L	75-79,9%	80-84,9%	85-89,9%	90-94,9%	95-100%
Mewujudkan tata Kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien	4	SS-4: Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/ Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM	a. Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas	83,00	86,00	90,00	90,50	91,00
			b. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasiona	85	88	90	92	95
			c. Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional	85%	88%	90%	92%	95%

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan Bappeda

Tujuan pelaksanaan kegiatan Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Lampung Tengah secara umum adalah agar tersediannya dokumen perencanaan makro, regional, spasial dan sektoral yang akan menjadi acuan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah dan stakeholder serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Sebagai salah satu unsur Penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Tengah berkewajiban untuk mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah daerah Tahun 2021-2026.

a. **Penyataan Visi.**

Visi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026 adalah **“Mewujudkan Rakyat Lampung Tengah Berjaya”**.

b. **Misi**

Dalam rangka mewujudkan Visi Kabupaten Lampung Tengah tersebut, maka didukung beberapa Misi sebagai berikut:

1. Misi ke-1: Meningkatkan Taraf Kesehatan, Pendidikan dan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat (Indeks Pembangunan Manusia Untuk Kesejahteraan Masyarakat).
2. Misi ke-2: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Guna Efektivitas Pergerakan Manusia, Barang dan Jasa (Percepatan Infrastruktur).
3. Misi ke-3: Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat melalui Peningkatan Produksi Pertanian dan Perkuatan Kesehatan Pangan Stabilitas Harga Jual Hasil Tani Guna Menekan Angka Kemiskinan (Petani Berjaya).
4. Misi ke-4: Menciptakan Kondisi Masyarakat yang Tertib, Aman, Damai serta Kondusif Guna Peningkatan Investasi Daerah (Stabilitas Keamanan).
5. Misi ke-5: Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Publik Guna Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik (*Good Governance*).

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, maka Bappeda menetapkan tujuan yang ingin dicapai, yaitu :

Terwujudnya Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah yang Berkualitas.

Sasaran Bappeda kabupaten Lampung Tengah

Untuk mendukung tercapainya Tujuan Bappeda Kabupaten Lampung Tengah maka diperlukan sasaran sebagai berikut yaitu :

1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah
- Indikator kinerja sasaran 1 adalah Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah komponen perencanaan kinerja
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja badan perencanaan pembangunan daerah
- Indikator kinerja sasaran 2 adalah Nilai AKIP Bappeda

Tujuan dan Sasaran Bappeda selanjutnya dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut :

**Tabel III.2 Tujuan dan Sasaran
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
1.	Terwujudnya Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah yang Berkualitas	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	1. Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah komponen perencanaan kinerja	22,07
			2. Persentase Indikator sasaran RPJMD tercapai atau melebihi target tahunan	77,3%
2.		Meningkatnya akuntabilitas kinerja badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai AKIP Bappeda	75,6%

C. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa kegiatan yang terkandung didalamnya guna mencapai tujuan tertentu.

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 tercantum pada Rencana Program dan Kegiatan Bappeda Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 dan perkiraan maju tahun 2024 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel T.C.3.3 berikut :

TABEL 3.3
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024						PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		
			LOKASI KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA (DALAM RIBU RUPIAH)			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SKPD
						APBD KAB	APBD PROV	APBN/ HIBAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Unsur Penunjang Urausan Pemerintahan										
	Perencanaan										
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku		95					95		
		Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti		100					100		
		Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin		100					100		
		Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik		90					90		

	Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku		14					14		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	Lampung Tengah	3	45,921,992	APBD KAB			3	48,218,091	Bappeda
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	Lampung Tengah	4	9,415,571	APBD KAB			4	9,886,349	Bappeda
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA- SKPD yang disusun	Lampung Tengah	2	7,177,937	APBD KAB			2	7,536,833	Bappeda
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Hasil Renja Perangkat daerah yang disusun	Lampung Tengah	5	15,476,013	APBD KAB			5	16,249,814	Bappeda
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen keuangan perangkat daerah yang disusun		42	-				42	-	Bappeda
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah fasilitasi pengajuan Gaji dan Tunjangan ASN Perangkat Daerah	Lampung Tengah	12	6,138,115,286	APBD KAB			12	6,445,021,050	Bappeda
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah penyediaan honorarium administrasi pelaksanaan tugas ASN	Lampung Tengah	12	708,904,744	APBD KAB			12	744,349,981	Bappeda
	Pelaksanaan penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Lampung Tengah	12	6,459,768	APBD KAB			12	6,782,756	Bappeda
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun Perangkat Daerah yang disusun	Lampung Tengah	18	6,257,900	APBD KAB			18	6,570,795	Bappeda
	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah bahan tanggapan pemeriksaann Perangkat Daerah yang disusun	Lampung Tengah	12	7,306,819	APBD KAB			12	7,672,160	Bappeda

	Koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran Perangkat Daerah yang disusun	Lampung Tengah	12	38,066,238	APBD KAB			12	39,969,550	Bappeda
	Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disusun		12	-				12	-	Bappeda
	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disusun	Lampung Tengah	12	9,758,779	APBD KAB			12	10,246,718	Bappeda
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang telah melengkapi berkas kepegawaianya		63	-				63	-	Bappeda
		Jumlah pegawai yang tidak pernah mendapat hukuman disiplin		63	-				63	-	Bappeda
		Jumlah pegawai yang telah memenuhi standar kompetensi teknis sesuai dengan bidang tugasnya		6	-				6	-	Bappeda
	peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Lampung Tengah	10	6,813,560	APBD KAB			10	7,154,238	Bappeda
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan pendataan pegawai yang disusun	Lampung Tengah	12	9,654,593	APBD KAB			12	10,137,322	Bappeda
	Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	Jumlah laporan informasi pegawai yang disusun	Lampung Tengah	10	6,511,586	APBD KAB			10	6,837,165	Bappeda
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian kinerja pegawai	Jumlah Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian kinerja pegawai yang disusun	Lampung Tengah	11	7,170,109	APBD KAB			11	7,528,614	Bappeda
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan tugas dan fungsi	Lampung Tengah	10	55,125,000	APBD KAB			10	57,881,250	Bappeda

	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Lampung Tengah	63	9,273,679	APBD KAB			63	9,737,363	Bappeda
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan	Lampung Tengah	63	84,279,620	APBD KAB			63	88,493,601	Bappeda
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah		72	-				72	-	Bappeda
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Lampung Tengah	12	53,349,203	APBD KAB			12	56,016,663	Bappeda
	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Lampung Tengah	1	220,500,000	APBD KAB			1	231,525,000	Bappeda
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah kebutuhan peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Lampung Tengah	30	31,252,127	APBD KAB			30	32,814,733	Bappeda
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak yang disediakan	Lampung Tengah	30	84,805,954	APBD KAB			30	89,046,251	Bappeda
		Jumlah penggandaan kebutuhan kantor	Lampung Tengah	30	-	APBD KAB			30	-	Bappeda
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi PD	Lampung Tengah	24	198,682,628	APBD KAB			24	208,616,759	Bappeda
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan		34	-				34	-	Bappeda
	Pengadaan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan pada Perangkat Daerah yang disediakan	Lampung Tengah	2	69,872,040	APBD KAB			2	73,365,642	Bappeda

	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya pada Perangkat Daerah yang disediakan	Lampung Tengah	32	187,728,188	APBD KAB			32	197,114,597	Bappeda
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan		3	-				3	-	Bappeda
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah pelayanan jasa kantor	Lampung Tengah	3	504,989,100	APBD KAB			3	530,238,555	Bappeda
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan		23	-				23	-	Bappeda
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas perorangan/jabatan yang mendapat pemeliharaan	Lampung Tengah	1	45,941,175	APBD KAB			1	48,238,234	Bappeda
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang mendapat pemeliharaan	Lampung Tengah	12	219,408,525	APBD KAB			12	230,378,951	Bappeda
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang mendapat pemeliharaan	Lampung Tengah	9	128,033,325	APBD KAB			9	134,434,991	Bappeda
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang mendapat pemeliharaan/rehabilitasi	Lampung Tengah	1	60,817,759	APBD KAB			1	63,858,647	Bappeda
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Ketersediaan Data Dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah		90	-				90	-	Bappeda
		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah		100	-				100	-	Bappeda
		Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun		3	-				3	-	Bappeda

	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah dokumen penelaahan rencana pembangunan daerah dengan dokumen kebijakan lainnya	Lampung Tengah	3	75,524,668	APBD KAB			3	79,300,901	Bappeda
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Pelaksanaan Konsultasi Publik	Lampung Tengah		-	APBD KAB				-	Bappeda
	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah pelaksanaan forum PD/Lintas Perangkat daerah yang dilaksanakan	Lampung Tengah	1	48,052,463	APBD KAB			1	50,455,086	Bappeda
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten yang dilaksanakan	Lampung Tengah	1	307,189,355	APBD KAB			1	322,548,822	Bappeda
	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah dokumen kooridnasi Musrenbang RKPD di Kecamatan yang disusun	Lampung Tengah	1	76,002,932	APBD KAB			1	79,803,079	Bappeda
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan Perkada	Lampung Tengah	3	550,618,709	APBD KAB			3	578,149,644	Bappeda
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah		2	-				2	-	Bappeda
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	Lampung Tengah	1	253,278,097	APBD KAB			1	265,942,002	Bappeda
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah PD yang mendapat pembinaan	Lampung Tengah	46	59,870,160	APBD KAB			46	62,863,668	Bappeda
	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen profil pembangunan daerah Kabupaten Lampung Tengah yang disusun	Lampung Tengah	1	128,035,640	APBD KAB			1	134,437,422	Bappeda

	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun		12	-				12	-	Bappeda
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi kebijakan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang disusun	Lampung Tengah	4	59,872,696	APBD KAB			4	62,866,331	Bappeda
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen evaluasi terhadap hasil RKPD yang disusun (triwulanan)	Lampung Tengah	8	178,638,516	APBD KAB			8	187,570,442	Bappeda
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase PD dengan rata-rata capaian kinerja di atas 76%		98	-				98	-	Bappeda
		Persentase Dokumen Renstra Kualitas Baik		100	-				100	-	Bappeda
		Persentase Dokumen Renja Kualitas Baik		100	-				100	-	Bappeda
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen Renstra dan Renja PD lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia kualitas baik		20	-				20	-	Bappeda
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang Pemerintahan yang disusun tepat waktu	Lampung Tengah	1	93,186,828	APBD KAB			1	97,846,169	Bappeda
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah PD yang dilakukan asistensi dokumen perencanaan	Lampung Tengah	4	25,316,708	APBD KAB			4	26,582,543	Bappeda

	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Rekomendasi Lingkup Bidang Pemerintahan yang ditindaklanjuti	Lampung Tengah	4	102,776,153	APBD KAB			4	107,914,960	Bappeda
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang disusun	Lampung Tengah	1	89,239,327	APBD KAB			1	93,701,293	Bappeda
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang Pembangunan Manusia yang disusun tepat waktu	Lampung Tengah	1	125,592,941	APBD KAB			1	131,872,588	Bappeda
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah PD yang dilakukan asistensi dokumen perencanaan	Lampung Tengah	16	42,113,295	APBD KAB			16	44,218,960	Bappeda
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Rekomendasi Lingkup Bidang Pembangunan Manusia yang ditindaklanjuti	Lampung Tengah	16	204,342,863	APBD KAB			16	214,560,006	Bappeda
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang disusun	Lampung Tengah	6	246,727,373	APBD KAB			6	259,063,741	Bappeda

	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen Renstra dan Renja PD lingkup bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) kualitas baik		11	-				11	-	Bappeda
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang Perekonomian yang disusun tepat waktu	Lampung Tengah	1	211,224,337	APBD KAB			1	221,785,554	Bappeda
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah PD yang dilakukan asistensi dokumen perencanaan	Lampung Tengah	11	71,740,226	APBD KAB			11	75,327,238	Bappeda
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Rekomendasi Lingkup Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti	Lampung Tengah	11	53,849,187	APBD KAB			11	56,541,646	Bappeda
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang disusun	Lampung Tengah	1	165,375,000	APBD KAB			1	173,643,750	Bappeda
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam (SDA) (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang Sumber Daya Alam (SDA) yang disusun tepat waktu	Lampung Tengah	1	197,554,770	APBD KAB			1	207,432,509	Bappeda
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam (SDA)	Jumlah PD yang dilakukan asistensi dokumen perencanaan	Lampung Tengah	11	79,675,470	APBD KAB			11	83,659,244	Bappeda

	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam (SDA)	Jumlah Rekomendasi Lingkup Bidang Sumber Daya Alam (SDA) yang ditindaklanjuti	Lampung Tengah	11	60,034,433	APBD KAB			11	63,036,154	Bappeda
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam (SDA)	Jumlah dokumen Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam (SDA) yang disusun	Lampung Tengah	1	165,375,000	APBD KAB			1	173,643,750	Bappeda
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen Renstra dan Renja PD lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan kualitas baik		6	-				6	-	Bappeda
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang Infrastruktur yang disusun tepat waktu	Lampung Tengah	1	193,742,325	APBD KAB			1	203,429,441	Bappeda
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah PD yang dilakukan asistensi dokumen perencanaan	Lampung Tengah	11	54,401,071	APBD KAB			11	57,121,124	Bappeda
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Rekomendasi Lingkup Bidang Infrastruktur yang ditindaklanjuti	Lampung Tengah	3	74,021,850	APBD KAB			3	77,722,943	Bappeda
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang disusun	Lampung Tengah	1	229,540,500	APBD KAB			1	241,017,525	Bappeda

	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang Kewilayahan yang disusun tepat waktu	Lampung Tengah	1	273,696,728	APBD KAB			1	287,381,564	Bappeda
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah PD yang dilakukan asistensi dokumen perencanaan	Lampung Tengah	12	70,394,625	APBD KAB			12	73,914,356	Bappeda
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Rekomendasi Lingkup Bidang Kewilayahan yang ditindaklanjuti	Lampung Tengah	5	171,362,016	APBD KAB			5	179,930,117	Bappeda
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang disusun	Lampung Tengah	1	223,311,375	APBD KAB			1	234,476,944	Bappeda

BAB IV

PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPEDA

KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 definisi dari program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Dengan pengertian tersebut dan setelah menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan jangka menengah 2021 -2026 maka untuk mendukung hal tersebut diatas Bappeda Kabupaten Lampung Tengah menetapkan rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN Dan EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

- 1) Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
 - Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
 - Pelaksanaan Konsultasi Publik
 - Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD
 - Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
 - Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan
 - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
 - Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
 - Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD
 - Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
- 3) Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

- Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
- Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah

2. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1) Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia

2) Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian

- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
- 3) Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan

3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan
- 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang

Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sasaran, indikator , target dan pendanaan setiap program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan Bappeda Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 tercantum pada table 4.1 Rencana Kerja Dan Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Kabutpaten Lampung Tegah sebagai berikut :

Tabel 4.1
PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Unsur Penunjang Urausan Pemerintahan			
	Perencanaan			
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	95	
		Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100	
		Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin	100	
		Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	90	
	Perencanaan,Penganggaran,dan Evalusai Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku	14	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	3	45,921,992
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	4	9,415,571

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	2	7,177,937
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Hasil Renja Perangkat daerah yang disusun	5	15,476,013
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen keuangan perangkat daerah yang disusun	42	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah fasilitasi pengajuan Gaji dan Tunjangan ASN Perangkat Daerah	12	6,138,115,286
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah penyediaan honorarium administrasi pelaksanaan tugas ASN	12	708,904,744
	Pelaksanaan penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12	6,459,768
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun Perangkat Daerah yang disusun	18	6,257,900
	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah bahan tanggapan pemeriksaann Perangkat Daerah yang disusun	12	7,306,819
	Koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran Perangkat Daerah yang disusun	12	38,066,238
	Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disusun	12	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disusun	12	9,758,779
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang telah melengkapi berkas kepegawaianya	63	

		Jumlah pegawai yang tidak pernah mendapat hukuman disiplin	63	
		Jumlah pegawai yang telah memenuhi standar kompetensi teknis sesuai dengan bidang tugasnya	6	
	peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	10	6,813,560
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kpegawaian	Jumlah laporan pendataan pegawai yang disusun	12	9,654,593
	Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	Jumlah laporan informasi pegawai yang disusun	10	6,511,586
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian kinerja pegawai	JumlahMonitoring, Evaluasi, dan Penilaian kinerja pegawai yang disusun	11	7,170,109
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan tugas dan fungsi	10	55,125,000
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	63	9,273,679
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan	63	84,279,620
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah	72	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12	53,349,203
	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1	220,500,000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah kebutuhan peralatan Rumah Tangga yang disediakan	30	31,252,127

	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	30	84,805,954
		Jumlah penggandaan kebutuhan kantor	30	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi PD	24	198,682,628
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan	34	
	Pengadaan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan pada Perangkat Daerah yang disediakan	2	69,872,040
	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya pada Perangkat Daerah yang disediakan	32	187,728,188
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan	3	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah pelayanan jasa kantor	3	504,989,100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan	23	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas perorangan/jabatan yang mendapat pemeliharaan	1	45,941,175
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang mendapat pemeliharaan	12	219,408,525
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang mendapat pemeliharaan	9	128,033,325

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang mendapat pemeliharaan/rehabilitasi	1	60,817,759
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Ketersediaan Data Dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	90	
		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	100	
		Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun	3	
	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah dokumen penelaahan rencana pembangunan daerah dengan dokumen kebijakan lainnya	3	75,524,668
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Pelaksanaan Konsultasi Publik		-
	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah pelaksanaan forum PD/Lintas Perangkat daerah yang dilaksanakan	1	48,052,463
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten yang dilaksanakan	1	307,189,355
	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah dokumen kooridnasi Musrenbang RKPD di Kecamatan yang disusun	1	76,002,932
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan Perkada	3	550,618,709
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	2	
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	1	253,278,097

	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah PD yang mendapat pembinaan	46	59,870,160
	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen profil pembangunan daerah Kabupaten Lampung Tengah yang disusun	1	128,035,640
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun	12	
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi kebijakan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang disusun	4	59,872,696
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen evaluasi terhadap hasil RKPD yang disusun (triwulanan)	8	178,638,516
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase PD dengan rata-rata capaian kinerja di atas 76%	98	
		Persentase Dokumen Renstra Kualitas Baik	100	
		Persentase Dokumen Renja Kualitas Baik	100	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen Renstra dan Renja PD lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia kualitas baik	20	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang Pemerintahan yang disusun tepat waktu	1	93,186,828
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah PD yang dilakukan asistensi dokumen perencanaan	4	25,316,708

	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Rekomendasi Lingkup Bidang Pemerintahan yang ditindaklanjuti	4	102,776,153
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang disusun	1	89,239,327
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang Pembangunan Manusia yang disusun tepat waktu	1	125,592,941
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah PD yang dilakukan asistensi dokumen perencanaan	16	42,113,295
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Rekomendasi Lingkup Bidang Pembangunan Manusia yang ditindaklanjuti	16	204,342,863
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang disusun	6	246,727,373
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen Renstra dan Renja PD lingkup bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) kualitas baik	11	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang Perekonomian yang disusun tepat waktu	1	211,224,337

	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah PD yang dilakukan asistensi dokumen perencanaan	11	71,740,226
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Rekomendasi Lingkup Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti	11	53,849,187
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang disusun	1	165,375,000
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam (SDA) (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang Sumber Daya Alam (SDA) yang disusun tepat waktu	1	197,554,770
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam (SDA)	Jumlah PD yang dilakukan asistensi dokumen perencanaan	11	79,675,470
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam (SDA)	Jumlah Rekomendasi Lingkup Bidang Sumber Daya Alam (SDA) yang ditindaklanjuti	11	60,034,433
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam (SDA)	Jumlah dokumen Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam (SDA) yang disusun	1	165,375,000
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen Renstra dan Renja PD lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan kualitas baik	6	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang Infrastruktur yang disusun tepat waktu	1	193,742,325

	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah PD yang dilakukan asistensi dokumen perencanaan	11	54,401,071
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Rekomendasi Lingkup Bidang Infrastruktur yang ditindaklanjuti	3	74,021,850
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang disusun	1	229,540,500
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang Kewilayahan yang disusun tepat waktu	1	273,696,728
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah PD yang dilakukan asistensi dokumen perencanaan	12	70,394,625
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Rekomendasi Lingkup Bidang Kewilayahan yang ditindaklanjuti	5	171,362,016
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang disusun	1	223,311,375

BAB V

PENUTUP

Kontribusi dan peran serta pelaku pembangunan, baik pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha serta sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin aparatur pemerintah daerah merupakan indikator-indikator keberhasilan pembangunan daerah, khususnya pembangunan daerah di wilayah Kabupaten Lampung Tengah.

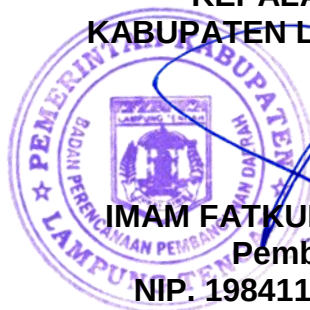
Perencanaan yang baik merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan pembangunan. Dengan perencanaan yang baik diharapkan pembangunan dapat berjalan efektif, efisien, terarah, berkesinambungan dan akuntabel sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai salah satu perangkat daerah Kabupaten Lampung Tengah yang memiliki otoritas dalam perencanaan daerah di Kabupaten Lampung Tengah telah menyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan Bappeda Tahun Anggaran 2024 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di tahun 2024.

Dengan adanya dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Tahun Anggaran 2024 ini semoga dapat digunakan sebagai pedoman dalam mewujudkan visi dan misi serta tujuan yang sudah menjadi tekad seluruh komponen masyarakat Kabupaten Lampung Tengah.

Gunung Sugih, 14 Agustus 2024

**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**



IMAM FATKUROJI, S.STP.,M.IP.
Pembina/IV/a
NIP. 19841110 200312 1 001